

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Maluku Utara

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

Provinsi Maluku Utara

2016

<https://malut.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2016

ISSN : 2460-7495
No. Publikasi : 82550.1710
Katalog BPS : 412004.82

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : X + 86halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar :
BPS Provinsi Maluku Utara

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
© BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

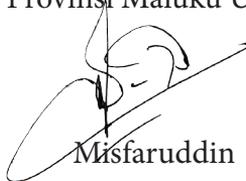
KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2016 merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Maluku Utara penerbitan ke-16 yang menyajikan data mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Maluku Utara antar kabupaten/kota dan tipe daerah. Data utama yang digunakan bersumber dari Proyeksi Penduduk Maluku Utara 2010-2035, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Maluku Utara Dalam Angka 2017.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, kami sampaikan penghargaan terima kasih. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Ternate, November 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Misfaruddin

<https://malut.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
SINGKATAN DAN AKRONIM	vi
1. KEPENDUDUKAN.....	2
2. KESEHATAN DAN GIZI	13
3. PENDIDIKAN	16
4. KETENAGAKERJAAN.....	21
5. POLA KONSUMSI.....	27
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	33
7. KEMISKINAN	27
8. SOSIAL LAINNYA.....	33
LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
ISTILAH TEKNIS.....	vi
SUMBER DATA.....	vi

<https://malut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2012-2016	4
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2012-2016.....	7
Tabel 1.3 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR), 2012-2016	9
Tabel 1.4 Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2015-2016	9
Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015-2016	11
Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) , 2012-2016	15
Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2015-2016.....	16
Tabel 2.3 Persentase Anak Usia 24-59 Bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, 2015-2016.....	17
Tabel 2.4 Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2015-2016	18
Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Persalinan Terakhir Menurut Penolong Persalinan, 2015-2016.....	19
Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2015-2016	21
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016	26
Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2016	27
Tabel 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016	28
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016	29
Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016	31
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015-2016	36
Tabel 4.2 Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016	37
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015-2016 .	39
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Status Pekerjaan, 2015-2016	41
Tabel 4.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2015-2016	42

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016	45
Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah),2015-2016	47
Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2015-2016.	47
Tabel 5.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2015-2016	49
Tabel 5.5 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016	50
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2015-2016	54
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2015-2016	55
Tabel 7.1 Perkembangan Kemiskinan, 2014-2016	59
Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Tujuan Utama dan Tipe Daerah, 2015-2016	63
Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2015-2016.	64
Tabel 8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Akses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Lokasi/Media, 2015-2016	65
Tabel 8.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2015-2016 ,	67

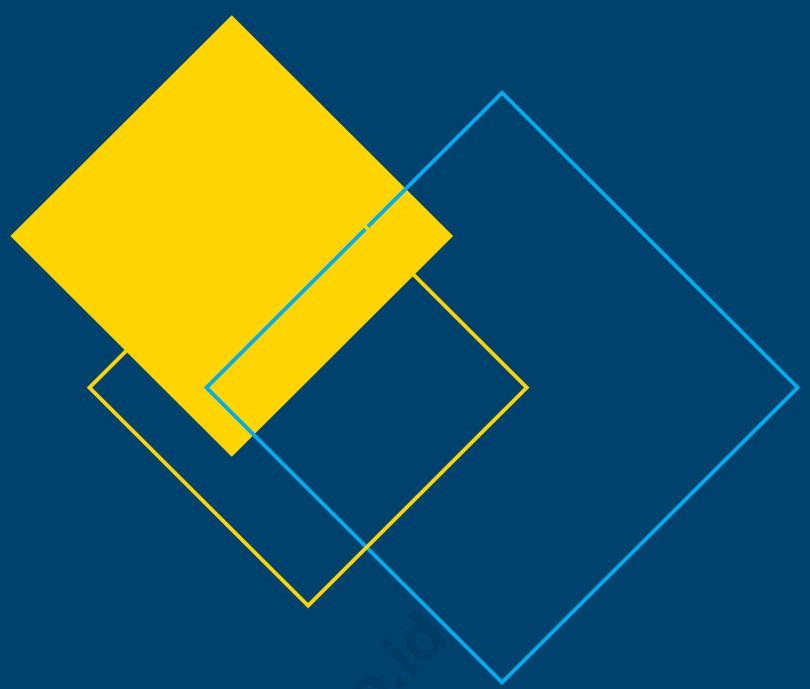
DAFTAR GAMBAR

1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2016	4
1.2 Persentase Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk, 2016	6
1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2015.....	6
5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, tahun 2014-2015	46
8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah,2015.....	66
8.2 Persentase Rumah Tangga yang Meerima Jaminan Sosial, 2015	66

<https://malut.bps.go.id>

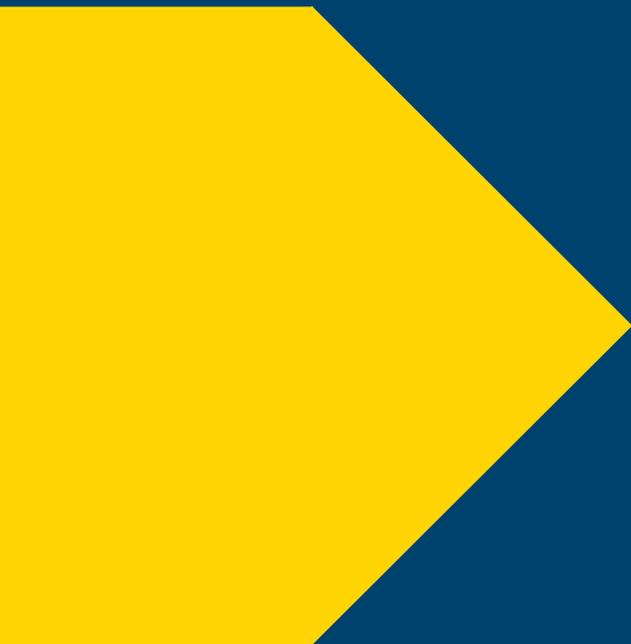
SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
ASI	: Air Susu Ibu
BPS	: Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	: Diploma 1/ Diploma 2 / Diploma3
K	: Perkotaan
D	: Perdesaan
K + D	: Perkotaan + Perdesaan
L	: Laki-laki
P	: Perempuan
L+P	: Laki-laki + Perempuan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
Sakernas	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SM	: Sekolah Menengah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMLB	: Sekolah Menengah Luar Biasa
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SP	: Sensus Penduduk
Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
Wajar	: Wajib Belajar



KEPENDUDUKAN

<https://lut.bps.go.id>



1

Penduduk sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan otomatis menjadi modal dasar yang diperlukan demi berhasilnya kegiatan pembangunan suatu wilayah. Masalah kependudukan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi beban dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk diantaranya adalah kelaparan akibat ketersediaan pangan yang tidak mencukupi, munculnya pemukiman kumuh, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia hingga maraknya aksi kriminalitas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah tidak hanya mengarah dalam hal kuantitas, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul karena tidak sejalannya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas penduduk adalah bertambahnya jumlah pengangguran karena terkadang kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak terpenuhi yang akan berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Maluku Utara dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035, jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai 1.185.912 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 23.567 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 1.162.345 jiwa. Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) jumlah penduduk Maluku Utara mengalami penambahan penduduk sebesar 94.837 jiwa atau meningkat sekitar 8,69 persen.

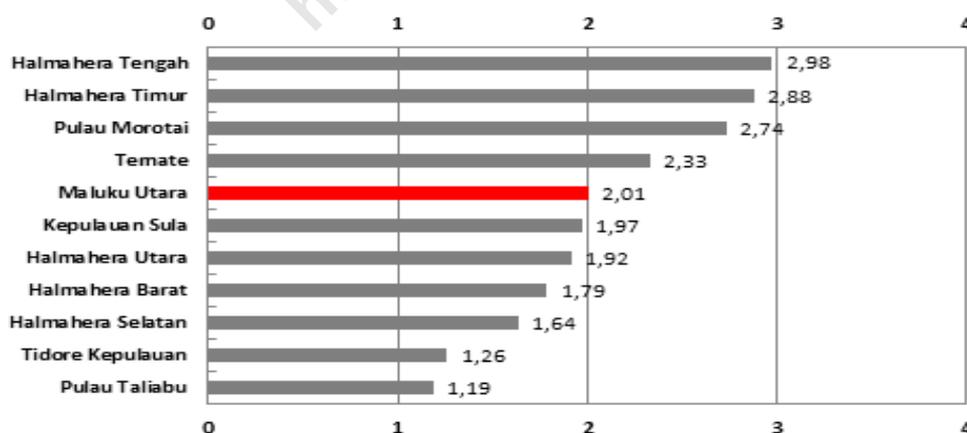
Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan Maluku Utara secara khusus adalah jumlah penduduk yang cukup besar. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,03 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara sebesar 2,24 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,13 persen pada tahun 2014 dan 2,08 persen pada tahun 2015. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Maluku Utara telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Maluku Utara, 2012-2016

Indikator Demografi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (Juta)	1,09	1,11	1,14	1,16	1,19
Laju Pertumbuhan Penduduk (persen/tahun)	2,24	2,18	2,13	2,08	2,03
Rasio Jenis Kelamin	104,38	104,33	104,28	104,23	104,17

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2015-2016 laju pertumbuhan penduduk di 4 kabupaten/kota berada di atas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Kota Ternate. Sementara itu, 6 kabupaten/kota lainnya mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan bahkan mengalami laju pertumbuhan di bawah 1,5 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan di atas, perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah bahwa angka pertumbuhan penduduk di Maluku Utara tidak homogen. Hal ini menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya perbedaan atau disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan.

Gambar 1.1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2016



Dari 1,19 juta penduduk Maluku Utara pada tahun 2016, terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 0,61 juta (51,04 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 0,58 juta (48,96 persen). Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Maluku Utara pada tahun 2016 sebesar 104,17. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. Dengan

kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Maluku Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Bila dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota maka di Maluku Utara tidak terdapat kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Maluku Utara pada tahun 2016 adalah Kabupaten Halmahera Timur (110,23), Pulau Morotai (106,06) dan Halmahera Tengah (105,00). (Lampiran 2).

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

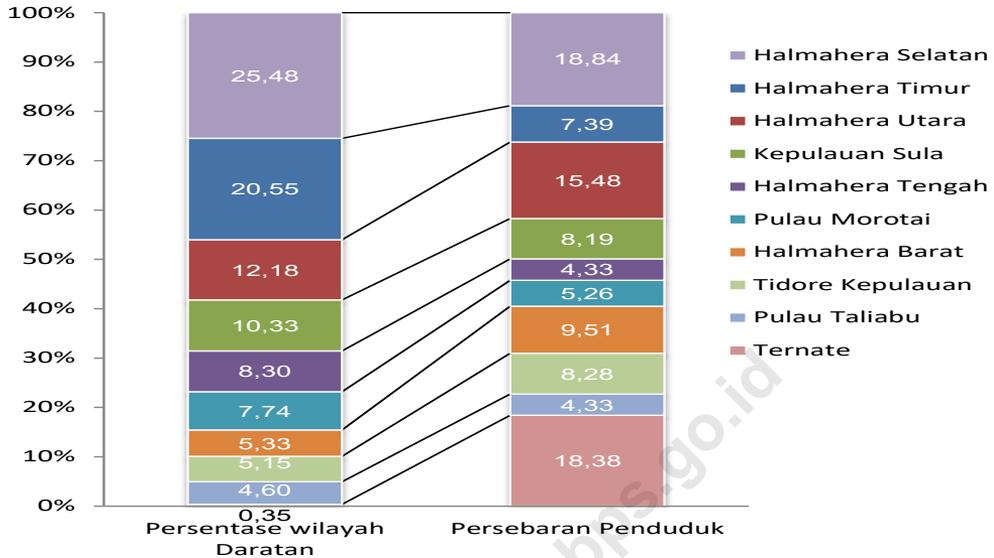
Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Demikian juga halnya dengan distribusi penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Jika dilihat dari pola persebaran penduduk, Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dengan persebaran penduduk antar kabupaten/kota yang masih timpang. Berdasarkan Gambar 1.2, Kota Ternate adalah kota dengan luas daratan paling sempit di Maluku Utara yaitu 0,35 persen dari seluruh daratan di Maluku Utara akan tetapi berdasarkan persebaran penduduk Maluku Utara 2016, Kota Ternate dihuni sekitar 18,38 persen penduduk Maluku Utara. Sebaliknya, Halmahera Selatan sebagai kabupaten dengan wilayah daratan terluas (luasnya sekitar 25,48 persen dari seluruh wilayah daratan Maluku Utara), hanya dihuni oleh sekitar 18,84 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara. Kondisi lebih ekstrim terjadi di Halmahera Timur, sebagai daerah terluas kedua dengan wilayah daratan sebesar 20,55 persen daratan Maluku Utara, namun hanya dihuni 7,39 persen penduduk Maluku Utara. Dari persebaran penduduk ini dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk di Maluku Utara belum merata.

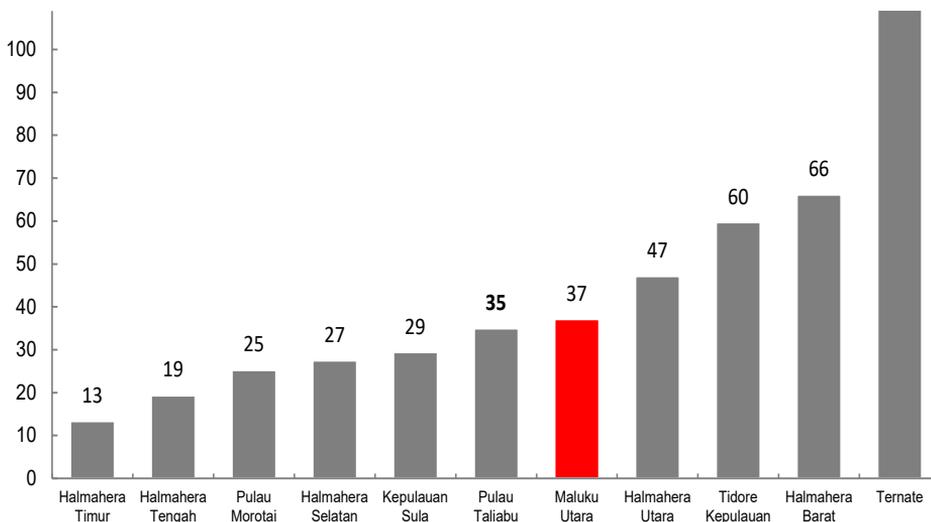
Ketimpangan persebaran penduduk di Maluku Utara menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota tidak merata. Kepadatan penduduk di Ternate yang luasnya paling kecil dari seluruh wilayah daratan Maluku Utara, mencapai 1.912 jiwa per km² pada 2016. Sebaliknya, kepadatan penduduk di sembilan kabupaten/kota lain yang memiliki wilayah lebih luas dari Ternate, kepadatan penduduknya kurang dari 65 jiwa per km², bahkan di Halmahera Timur hanya 13 jiwa per km².

Gambar 1.2 Persentase Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk, 2016



Sedangkan secara umum, kepadatan penduduk di Maluku Utara pada 2016 mencapai 37 jiwa per km². Terdapat empat kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi, yaitu Halmahera Utara (47 jiwa per km²), Tidore Kepulauan (60 jiwa per km²), Halmahera Barat (66 jiwa per km²) dan Ternate (1.957 jiwa per km²).

Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Tingginya kepadatan penduduk di Kota Ternate sebagai wilayah tersempit di Maluku Utara mengindikasikan bahwa Ternate menjadi pilihan utama bagi para migran. Meskipun ibu kota provinsi sudah pindah ke Sofifi (Tidore Kepulauan), namun semua kegiatan masih terpusat di Ternate. Selain itu fasilitas-fasilitas umum di Ternate lebih lengkap dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan lebih proaktif untuk meningkatkan infrastrukturnya sehingga bisa meningkatkan daya tarik daerah masing-masing dan dapat mewujudkan persebaran dan kepadatan penduduk yang merata.

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komposisi Penduduk					
0-14 Tahun	35,80	35,69	36,21	34,42	33,78
15-64 Tahun	61,36	61,55	61,88	62,43	63,00
65 Tahun +	2,84	2,76	2,91	3,15	3,21
Angka Beban Ketergantungan (persen)	62,96	62,47	61,60	60,18	59,15

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2012-2016 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2012 angka beban tanggungan Maluku Utara sebesar 62,96 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 62 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2014 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 61,60 persen dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 60,18 persen. Saat ini (tahun 2016), angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 59,15 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung

beban 5 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 ada sebanyak 35,80 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 33,78 persen pada tahun 2016. Pada Tabel 1.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 61,36 persen pada tahun 2012 dan kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 62,43 persen dan kembali meningkat menjadi 63,00 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Maluku Utara menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) cenderung bertambah dari 2,84 persen pada tahun 2012 menjadi 3,15 persen pada tahun 2015 dan 3,21 persen pada tahun 2016.

Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*), dan Angka Reproduksi Neto (*Net Reproductive Rate/NRR*). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator TFR mempunyai kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada Tabel 1.3 terlihat bahwa TFR (berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035) sejak tahun 2012-2016 tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 3,14 menjadi hanya 3,03. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 3 anak.

Tabel 1.3 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR), 2012-2016

Indikator Fertilitas	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TFR	3,14	3,11	3,09	3,06	3,03

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu “variabel antara” yang berpengaruh langsung terhadap fertilitas. Ini dikarenakan pada saat perkawinan pertama, secara formal seorang wanita diasumsikan akan memasuki kehidupan seksual, yang berarti pada dimulainya masa menghadapi resiko melahirkan. Batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) harus berusia minimal 16 tahun.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun pada tahun 2016 cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan yaitu 5,20 persen berbanding 3,77 persen. Demikian pula yang terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu di daerah perdesaan sebesar 29,82 persen dan di perkotaan sebesar 19,30 persen. Sebaliknya pada kelompok umur 19 tahun ke atas, di perkotaan memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Pada kelompok umur 19-24 tahun persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di perkotaan sebesar 54,12 persen sedangkan di perdesaan sebesar 51,19 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 25 tahun ke atas persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di perkotaan sebesar 22,81 persen sedangkan di perdesaan sebesar 13,78 persen.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2015 -2016

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-15	1,78	3,77	3,64	5,20	3,14	4,83
16-18	14,17	19,30	20,97	29,82	19,16	27,08
19-24	68,76	54,12	64,94	51,19	65,96	51,95
25 +	15,29	22,81	10,45	13,78	11,74	16,13

Sumber : Susenas 2016

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2015, dari 10 kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten/kota yang menunjukkan persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun lebih tinggi dari persentase angka Maluku Utara. Persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 9,21 persen diikuti oleh Kabupaten Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu masing-masing sebesar 7,92 persen dan 6,76 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kota Tidore Kepulauan sebesar 2,02 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya terdapat 1 kabupaten/kota yaitu Kota Tidore Kepulauan yang menunjukkan penurunan persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun (sesuai dengan angka Maluku Utara), sedangkan sisanya 9 kabupaten/kota justru mengalami kenaikan.

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Perkembangan cakupan ber-KB khususnya di Maluku Utara dapat dikatakan lambat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sekitar 50 persen yaitu masing-masing sebesar 51,73 persen pada tahun 2015 dan 49,13 persen pada tahun 2016. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan, yaitu sebesar 52,62 persen pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi 51,51 persen pada tahun 2016. Sedangkan wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan yaitu sebesar 49,20 persen pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi 42,32 persen pada tahun 2016.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015-2016

Alat/Cara Kontrasepsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MOW/Tubektomi	0,95	0,90	0,72	0,33	0,78	0,46
MOP/Vasektomi	0,38	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00
AKDR/IUD/Spiral	3,89	4,90	0,75	0,68	1,52	1,62
Suntikan	69,96	64,45	77,32	73,46	75,51	71,46
MOW/Tubektomi	13,26	17,11	9,93	14,69	10,75	15,23
MOP/Vasektomi	9,93	11,72	9,38	7,74	9,52	8,62
AKDR/IUD/Spiral	0,00	0,00	0,14	0,25	0,10	0,19
Suntikan	1,63	0,92	1,61	2,85	1,62	2,42
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	49,20	42,32	52,62	51,51	51,73	49,13

Sumber : Susenas 2016

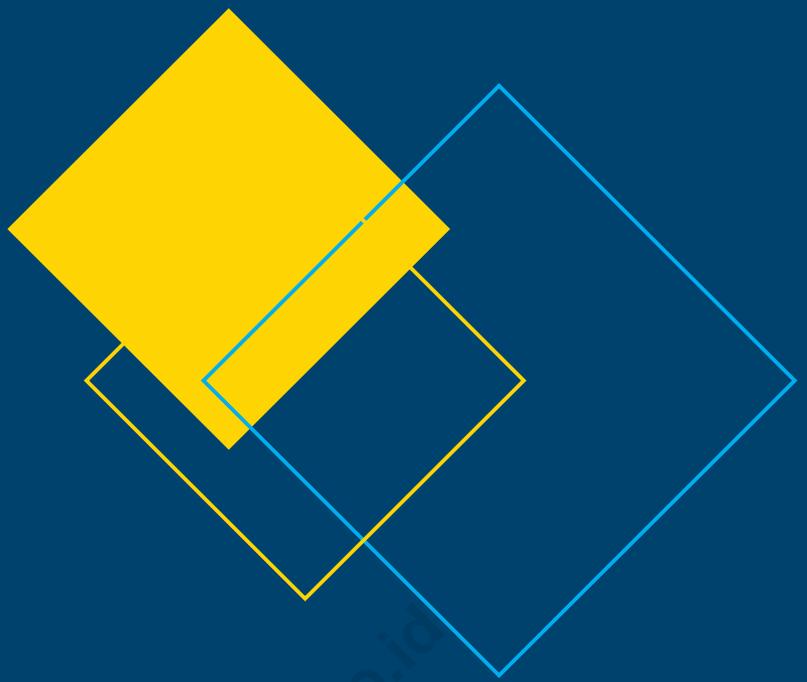
Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah Kondom/Karet/Intravag, MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi, masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen. Jika dilihat pertumbuhannya, alat/cara KB yang mengalami peningkatan pengguna selama tahun 2014-2015 yaitu Suntikan, MOW/Tubektomi dan cara tradisional. Sebaliknya alat/cara KB yang mengalami penurunan pengguna selama tahun 2014-2015 adalah MOP/Vasektomi, AKDR/IUD/Spiral, Susuk KB/Norplant, Pil KB dan Kondom/Karet/Intervag.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tinggal di daerah perkotaan maupun di perdesaan sebagian besar memilih menggunakan alat/cara KB suntik. Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa wanita yang menggunakan alat/cara KB suntik di perdesaan lebih tinggi yaitu sebanyak 73,46 persen dibanding di daerah perkotaan yang hanya mencapai 64,45 persen. Sebaliknya wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang menggunakan alat/cara KB pil lebih banyak di

daerah perkotaan dibanding pedesaan yaitu 11,72 persen berbanding 7,74 persen.

Sedangkan untuk alat/cara KB jangka panjang, baik di daerah perkotaan dan pedesaan lebih memilih alat/cara susuk KB/norplant/implanon/alwalit yang jumlahnya sebesar 13,26 persen pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 17,11 persen pada tahun 2016 untuk perkotaan, sementara itu di pedesaan jumlahnya juga meningkat dari 9,93 persen pada tahun 2015 menjadi 14,69 persen pada tahun 2016. Alat/cara KB jangka panjang lainnya seperti AKDR/IUD/Spiral belum menjadi alternatif pilihan oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tinggal di daerah perkotaan maupun di pedesaan dilihat dari persentase penggunaannya yang hanya sebesar 4,90 persen untuk perkotaan dan 0,68 persen untuk pedesaan pada tahun 2016.

<https://malut.bps.go.id>



KESEHATAN DAN GIZI

2

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan usia harapan hidup penduduknya. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Maluku Utara telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup, tercatat dari berumur 67,05 tahun (tahun 2012) menjadi lebih panjang usia mencapai 67,34 tahun (tahun 2014) dan terakhir mencapai 67,51 tahun (tahun 2016). Peningkatan angka harapan hidup ini dikarenakan pengaruh dari beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH	67,05	67,24	67,34	67,44	67,51
AKB	38,37	37,63	36,98	36,20	35,70

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Angka Kematian Bayi di Maluku Utara telah mengalami penurunan secara

berangsur-angsur dari 38,37 pada tahun 2012 menjadi 35,70 pada tahun 2016. AKB di Maluku Utara masih termasuk tinggi karena di tahun 2016 terjadi 36 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator kesehatan yang terkait erat dengan AKB yang telah disebutkan sebelumnya, namun saling tolak belakang ketika mewakili kondisi suatu wilayah. Maksudnya, jika suatu wilayah dengan AKB tinggi biasanya diikuti oleh AHH yang rendah. Sebaliknya yang terjadi bila AHH tinggi, maka diiringi oleh rendahnya AKB.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Maluku Utara mencapai 16,25 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,78 persen. Angka Kesakitan penduduk tahun 2016 yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, masing-masing sekitar 18,22 persen dan 15,52 persen.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2015-2016

Daerah Tempat Tinggal	Angka Kesakitan (%)		Lama Sakit (hari)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	13,95	18,22	5,33	5,35
Perdesaan	10,97	15,52	5,93	6,51
Perkotaan + Perdesaan	11,78	16,25	5,73	6,19

Sumber : Susenas 2016

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Meningkatnya angka kesakitan (morbiditas) pada tahun 2016 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih buruk, jika tidak diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun 2016 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6 hari. Selama tahun 2016, rata-rata lama sakit penduduk di pedesaan sedikit lebih lama dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Rata-rata lama sakit penduduk yang tinggal di pedesaan pada tahun 2015 sekitar

5,93 hari dan meningkat menjadi 6,51 hari pada tahun 2016. Rata-rata lama sakit di daerah perkotaan pada periode yang sama meningkat dari 5,33 hari menjadi 5,35 hari pada tahun 2016. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/ minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 2.3 Persentase Anak Usia < 24 Bulan yang Pernah Diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI, 2015

Daerah Tempat Tinggal	Anak Usia <24 bulan yang Pernah Diberi ASI (%)		Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	90,82	82,19	9,69	10,73
Perdesaan	95,46	92,09	9,41	10,32
Perkotaan + Perdesaan	94,42	89,12	9,47	10,44

Sumber : Susenas 2016

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Maluku Utara ada sebanyak 89,12 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal ternyata persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di perdesaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, masing-masing sekitar 92,09 persen dan 82,19 persen. Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan

ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama pemberian ASI pada tahun 2016 di Maluku Utara hanya sekitar 10 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.4 Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2015-2016

Jenis Imunisasi	Laki-Laki		Perempuan		Laki=Laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	92,45	86,87	92,29	89,31	92,37	88,07
DPT	81,10	79,04	80,34	81,71	80,75	80,36
Polio	92,95	88,87	89,99	89,31	91,58	89,09
Campak	72,26	69,64	69,94	71,76	71,19	70,69
Hepatitis B	76,72	74,25	75,22	78,27	76,03	76,24

Sumber : Susenas 2016

Hasil Susenas 2016, mayoritas anak umur 0-59 bulan (balita) di Maluku Utara sudah mendapatkan imunisasi wajib. Balita yang mendapatkan imunisasi Polio sudah mencapai 89,09 persen sedangkan untuk imunisasi BCG sekitar 88,07 persen. Sementara itu, balita yang mendapatkan imunisasi DPT hanya sebesar 80,36 persen sedangkan untuk imunisasi campak dan hepatitis B masih di bawah 80 persen yaitu sekitar 70,69 persen untuk balita yang mendapat imunisasi campak dan 76,24 persen untuk balita yang mendapat imunisasi hepatitis B.

Sementara, balita yang pernah mendapat imunisasi menurut kabupaten/kota, dapat dilihat di Lampiran 5. Berdasarkan hasil Susenas 2016 persentase anak umur 0-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib (BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B) paling sedikit terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu masing-masing sebesar 79,57 persen imunisasi BCG, 52,39 persen imunisasi DPT, 79,98 persen imunisasi Polio, dan 43,12 persen imunisasi campak serta 48,55 persen imunisasi Hepatitis B. Sedangkan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi untuk hampir semua jenis imunisasi adalah Kota Tidore Kepulauan, dimana untuk imunisasi BCG hampir mencapai 95 persen.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan proses persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan di Maluku Utara pada tahun 2016 sebanyak 72,80 persen. Hal tersebut disebabkan oleh peran bidan sebagai penolong persalinan, baik di perkotaan (50,01 persen) maupun di perdesaan (50,43 persen). Penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter di daerah perkotaan sebanyak 41,31 persen sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 11,49 persen. Penolong persalinan oleh dukun tradisional terjadi terutama di daerah perdesaan, persentasenya adalah 34,82 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebanyak 6,89 persen.

Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Persalinan Terakhir Menurut Penolong Persalinan, 2015-2016

Penolong Proses Persalinan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan	87,27	91,70	59,22	64,28	65,96	72,80
-Dokter	35,00	41,31	12,79	11,49	18,13	20,75
-Bidan	51,52	50,01	44,27	50,43	46,02	50,30
-Lainnya	0,75	0,38	2,16	2,36	1,82	1,75
Bukan Tenaga Kesehatan	12,73	8,30	40,78	35,72	34,04	27,2
-Dukun Tradisional	12,71	6,89	39,01	34,82	32,70	26,14
-Lainnya	0,02	1,41	1,76	0,90	1,34	1,06

Sumber : Susenas 2016

Tenaga penolong persalinan yang memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti dukun di saat proses melahirkan. Lebih rinci pengamatan per kabupaten/kota di Maluku Utara sepanjang tahun 2016 menunjukkan bahwa untuk tenaga dukun sebagai penolong persalinan di beberapa kabupaten/kota masih sangat tinggi

bahkan ada yang diatas 50 persen persalinan dilakukan oleh dukun yaitu Kabupaten Kepulauan Sula (69,68 persen) dan Pulau Taliabu (67,92 persen). Kondisi yang demikian ini diduga erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan ibu dan kemampuan ekonomi keluarga yang disertai fasilitas kesehatan yang terbatas di daerah tersebut.

Sebaliknya angka persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun di Kota Ternate dan Halmahera Utara relatif kecil tidak sampai 10 persen. Seiring dengan rendahnya penolong kelahiran yang dibantu oleh dukun, maka diimbangi dengan tingginya persentase penolong oleh tenaga medis yang ada di kedua wilayah ini yaitu tenaga penolong kelahiran oleh bidan sebesar 49,96 persen untuk Ternate dan 71,86 persen untuk Halmahera Utara. Sedangkan untuk penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter baik kandungan maupun umum mencapai 45,33 persen untuk Ternate dan 13,22 persen untuk Halmahera Utara. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk di perkotaan yang berobat ke fasilitas praktek dokter/bidan/klinik pada tahun 2015 sebesar 38,41 persen dan 38,31 persen yang berobat ke puskesmas. Tempat rujukan berobat praktek dokter/klinik dan petugas kesehatan di wilayah perkotaan pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015) dan sebaliknya terjadi peningkatan penduduk yang memanfaatkan berobat ke puskesmas dari 29,09 persen pada tahun 2015 menjadi 38,31 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk yang berobat ke dukun bersalin dan lainnya mengalami peningkatan, yaitu dari 0,77 persen pada tahun 2015 menjadi 1,41 persen pada tahun 2016. Sedangkan penduduk yang berobat ke pengobatan tradisional mengalami peningkatan dari 2,18 persen pada tahun 2015 menjadi 2,44 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2015-2016

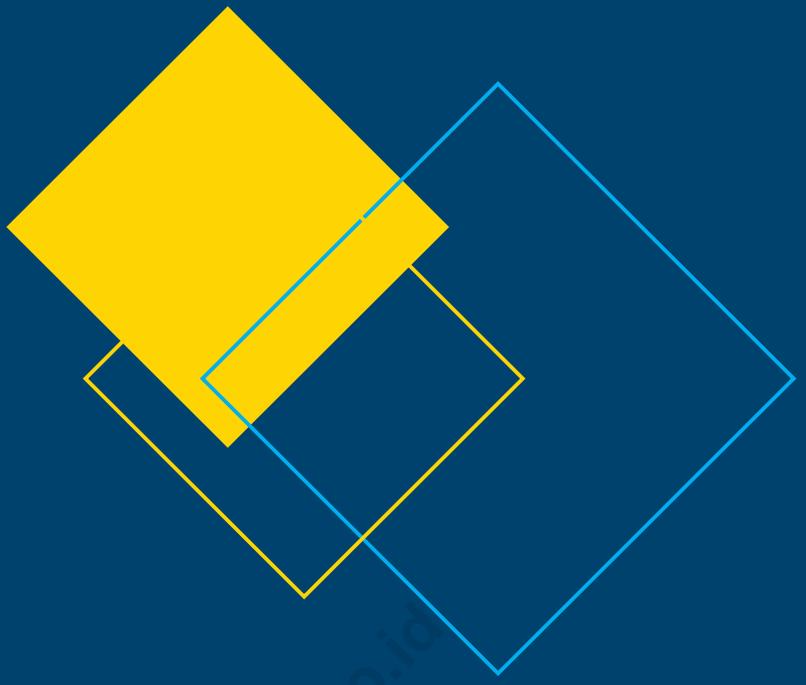
Tempat Berobat	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	20,09	22,73	11,72	13,42	14,14	12,21
Praktek Dokter/ Bidan/Klinik	50,95	38,41	25,21	22,29	32,66	27,14
Puskesmas	29,09	38,31	57,71	56,42	49,43	50,97
Petugas Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Pengobatan Tradisional	2,18	2,44	3,28	2,33	2,96	2,36
Dukun Bersalin dan Lainnya	0,77	1,41	39,01	34,82	32,70	26,14

Sumber : Susenas 2016

Sementara itu, penduduk di perdesaan pada tahun 2016 cenderung lebih memilih tempat berobat ke puskesmas yaitu sekitar 56,42 persen karena fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang mudah dijangkau dan yang tersedia di daerah perdesaan. Selain itu juga persentase penduduk di perdesaan yang berobat ke rumah sakit dan dukun bersalin dan lainnya secara berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2016 masing-masing menjadi 13,42 persen dan 10,82 persen. Sementara penduduk yang berobat ke praktek dokter/bidan/klinik dan puskesmas justru mengalami penurunan pada tahun 2016 masing-masing menjadi 22,29 persen dan 56,42 persen.

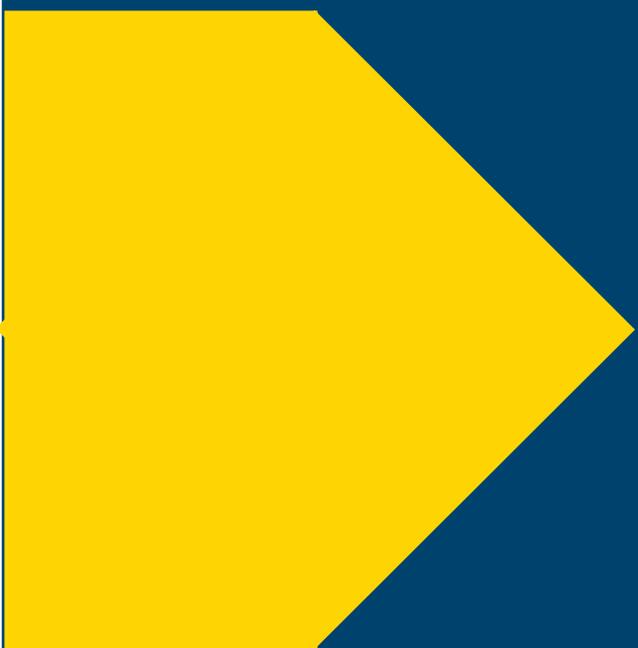
Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>



<https://malut.bps.go.id>

PENDIDIKAN



3

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Relevansi pendidikan merupakan konsep “link and match”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Penurunan AMH penduduk usia 15 tahun ke atas terjadi pada semua kelompok umur. Penurunan tertinggi terjadi pada kelompok umur 50 ke atas. Pada kelompok umur ini tercatat AMH turun dari 94,75 persen pada tahun 2015 menjadi 93,87 persen pada tahun 2016. Penurunan paling kecil terjadi pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu dari 99,68 persen menjadi 99,67 persen. Pada tahun 2016 AMH penduduk pada

kelompok umur 15-19 tahun sebesar 99,37 persen, kelompok umur 25-34 tahun sebesar 99,16 persen, dan kelompok umur 35-49 tahun sebesar 93,87 persen.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	100,00	99,83	99,68	99,17	99,78	99,37
20-24	99,88	100,00	99,58	99,48	99,68	99,67
25-34	99,99	99,49	98,86	99,03	99,19	99,16
35-49	99,67	99,71	99,28	98,76	99,39	99,02
50+	98,10	97,30	93,52	92,67	94,75	93,87
15 +	99,54	99,25	98,06	97,63	98,49	98,10
Laki-Laki	99,76	99,70	98,80	98,34	99,08	98,72
Perempuan	99,31	98,80	97,27	96,90	97,87	97,45

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki mengalami penurunan dari 99,08 persen menjadi 98,72 persen. Hal ini terjadi karena didorong oleh penurunan AMH baik di perkotaan maupun di perdesaan. AMH penduduk laki-laki di perkotaan pada tahun 2016 tercatat sebesar 99,70 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 98,34 persen. AMH penduduk perempuan pada tahun yang sama mengalami penurunan juga dari 97,87 persen menjadi 97,45 persen. Hal ini berkaitan dengan angka melek huruf di perkotaan dan perdesaan yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. AMH penduduk perempuan di perkotaan pada tahun 2016 tercatat sebesar 98,80 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 96,90 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum AMH laki-laki lebih tinggi daripada AMH perempuan.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, AMH penduduk umur 15 tahun ke atas di perkotaan (99,25 persen) menunjukkan nilai lebih tinggi dari AMH di perdesaan (97,63 persen). Dari pencapaian AMH tersebut baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan bahwa angka buta huruf tercatat sudah di bawah 5 persen. Namun demikian, pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Target pemerintah dapat menurunkan angka buta aksara penduduk usia dewasa hingga 3,91 persen pada tahun 2014 (Renstra Kemdikbud 2014-2019).

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	7,36	7,55	7,71	7,77	7,86
Halmahera Tengah	7,28	7,69	7,74	7,85	8,14
Kepulauan Sula	7,42	7,86	7,91	7,95	7,96
Halmahera Selatan	6,95	6,99	7,03	7,15	7,42
Halmahera Utara	7,92	7,97	7,98	8,06	8,35
Halmahera Timur	7,02	7,33	7,34	7,57	7,77
Pulau Morotai	6,70	6,81	6,84	6,84	6,88
Pulau Taliabu		7,39	7,40	7,41	7,42
Ternate	10,58	11,06	11,11	11,12	11,13
Tidore Kepulauan	8,44	8,61	8,72	8,91	9,11
Maluku Utara	8,04	8,27	8,34	8,37	8,52

Sumber : Susenas 2016

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2015 di Maluku Utara sebesar 8,52 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,37 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Maluku Utara mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Bila diamati dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara terdapat 2 wilayah dengan angka rata-rata lama sekolah di atas angka Maluku Utara yaitu Kota Ternate (11,13 tahun) dan Kota Tidore Kepulauan (9,11 tahun), dengan kata lain penduduk Ternate sudah menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMA atau putus di kelas 3 SMA sedangkan penduduk Tidore Kepulauan sudah menempuh pendidikan sampai kelas 3 SMP atau putus di kelas 1 SMA.

Tingkat Pendidikan

Indikator lain yang dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki atau ijazah pendidikan terakhirnya. Indikator tingkat pendidikan pada publikasi ini menggunakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan/ijazah terakhir yang ditamatkannya. Pada 2016, secara umum penduduk umur 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas relatif lebih rendah dibanding penduduk yang maksimal menamatkan pendidikan SD yaitu 43,28 persen.

Jika dilihat dari tipe daerah, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding penduduk di perdesaan. Sebagian besar penduduk di perkotaan pada tahun 2016 berpendidikan dasar 26,03 persen, 11,62 persen telah berpendidikan SMP, 35,67 persen berpendidikan SMA/SMK/MA, dan 14,30 persen telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, yang sebagian besar masih berpendidikan SD (36,83 persen) bahkan juga masih banyak yang tidak berijazah (tidak sekolah atau tidak tamat SD) sebanyak 25,96 persen.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Mempunyai Ijazah	8,28	12,37	20,26	25,96	16,79	22,58
SD/MI	14,14	26,03	32,28	36,83	27,03	34,14
SMP/MTS	20,31	11,62	21,54	11,55	21,19	11,57
SMA/SMK	36,94	34,89	18,14	20,42	23,58	24,02
MA/MAK	4,83	0,78	1,71	0,30	2,61	0,42
Diploma I/II	1,47	0,70	0,75	0,65	0,96	0,66
Diploma III/ Sarjana Muda	2,12	1,70	1,01	0,57	1,33	0,85
Diploma IV / S1/S2/S3	11,90	11,90	4,31	3,73	6,51	5,77

Sumber : Susenas 2016

Bila dibandingkan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan menurut kabupaten/kota, tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dari perempuan. Secara umum pada tahun 2016 penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan SMP ke atas mencapai 75,72 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 72,87

persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada tingkat pendidikan SD/belum tamat SD/tidak bersekolah. Penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan SD/belum tamat SD/tidak bersekolah justru lebih rendah dari perempuan (24,28 persen berbanding 27,13 persen). Kondisi yang sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada Lampiran 8.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016

Tingkat Pendidikan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	L	99,70	98,41	99,07	99,24	99,22	99,06
	P	99,88	100,00	98,64	99,00	98,93	99,24
	L + P	99,79	99,21	98,86	99,13	99,08	99,14
13-15	L	97,73	96,15	99,05	96,44	98,70	96,37
	P	94,90	97,00	94,76	97,58	94,80	97,43
	L + P	96,28	96,57	96,83	97,01	96,68	96,90
16-18	L	83,33	82,72	76,95	73,07	78,67	75,86
	P	76,10	83,23	69,08	72,23	71,16	75,28
	L + P	79,79	82,96	73,34	72,66	75,16	75,58

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan data Susenas tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk berumur 7- 12 tahun sebesar 99,14 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yang sebesar 99,08 persen, sedangkan penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 96,90 persen atau mengalami kenaikan dari

tahun sebelumnya yang sebesar 96,68 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur berumur 16-18 tahun juga mengalami kenaikan dari 75,16 persen menjadi 75,58 persen. Peningkatan APS pada semua kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, pada tahun 2016 APS penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan kecuali pada kelompok umur 13-15 tahun. APS kelompok umur 7-12 tahun di perkotaan sebesar 99,21 persen sedangkan di perdesaan sebesar 99,13 persen. Sementara itu, APS pada kelompok umur 13-15 tahun di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 96,57 persen dan 97,01 persen. Kesenjangan mulai terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu APS di perkotaan sebesar 82,96 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 72,66 persen. Walaupun demikian kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan semakin menurun bila dibandingkan tahun 2015. Pemerintah harus terus meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah agar lebih merata dan dapat dijangkau bagi masyarakat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan terlihat lebih baik bila dibandingkan penduduk laki-laki. APS penduduk perempuan pada semua kelompok umur lebih tinggi bila dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali kelompok umur 16-18 tahun. APS penduduk perempuan tahun 2016 pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,24 persen sedangkan APS penduduk laki-laki sebesar 99,06 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS penduduk perempuan sebesar 97,43 persen dan penduduk laki-laki sebesar 96,37 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan sebesar 75,28 persen berbanding 75,86 persen (APS penduduk laki-laki). Perbedaan APS penduduk perempuan dan laki-laki menunjukkan adanya kesenjangan yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya pendidikan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Peningkatan APS yang terjadi pada tahun 2016 juga terjadi pada Angka Partipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Secara umum APM SD sebesar 96,75 persen pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,65 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 75,38 persen menjadi 75,68 persen. Sama halnya dengan APM SD dan SMP, APM SMA juga mengalami kenaikan dari 63,20 persen menjadi 63,47 persen. Peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan tersebut juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, baik APM SD dan SMP di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, sebaliknya APM SMA di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. APM SD di perdesaan mencapai 98,00 persen sedangkan di perkotaan sebesar 92,45 persen. Sementara itu, APM SMP di perdesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 77,42 persen dan 70,42 persen. Pada APM SD tampak kesenjangan antara APM perkotaan dan APM perdesaan dapat dikatakan kecil dan kesenjangan semakin besar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada APM SMP kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan mencapai 7,00 persen. Kesenjangan semakin besar pada APM SMA dengan APM perkotaan sebesar 69,42

persen dan APM perdesaan sebesar 61,12 persen sehingga tingkat kesenjangan mencapai 8,30 persen. Pemerintah diharapkan terus menekan kesenjangan APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi antara perkotaan dan perdesaan dengan memberikan kemudahan akses pendidikan di perdesaan.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016

Tingkat Pendidikan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI 1)	L	96,43	93,79	96,63	98,13	96,58	97,20
	P	92,31	91,13	98,05	97,86	96,72	96,25
	L + P	94,44	92,45	97,31	98,00	96,65	96,75
S M P / MTS 2)	L	73,81	65,01	80,88	73,67	78,97	71,50
	P	70,43	75,91	72,62	81,13	72,03	79,84
	L + P	72,07	70,42	76,61	77,42	75,38	75,68
S M A / SMK/MA 3)	L	78,43	68,03	59,55	58,60	64,64	61,33
	P	66,85	71,00	59,33	63,82	61,55	65,81
	L + P	72,76	69,42	59,45	61,12	63,20	63,47

Catatan : 1)Termasuk Paket A

2)Termasuk Paket B

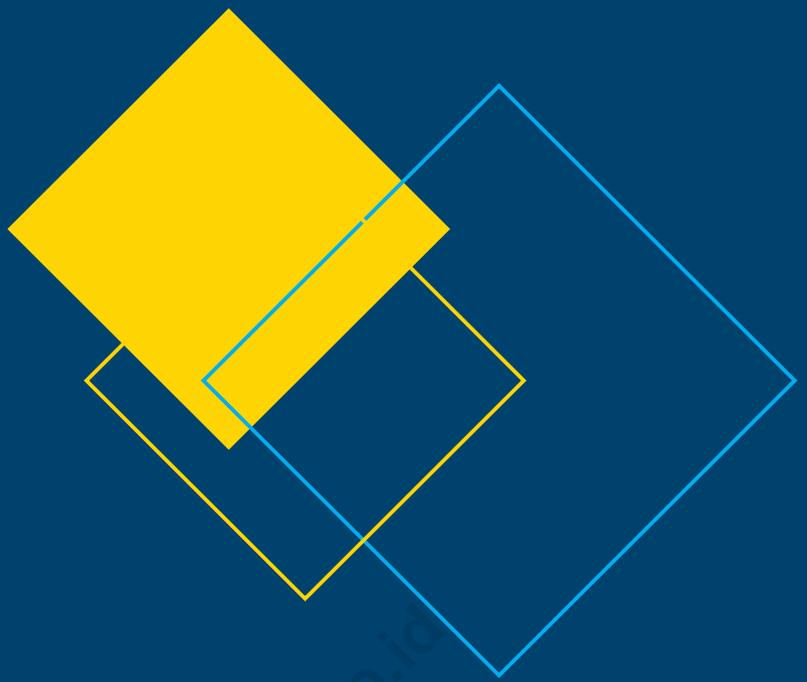
3)Termasuk Paket C

Sumber : Susenas 2016

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM SD laki-laki terlihat lebih tinggi bila dibandingkan APM SD perempuan. APM SD penduduk laki-laki sebesar 97,20 persen atau sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 96,25 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada APM SMP, APM SMP penduduk perempuan justru lebih tinggi daripada laki-laki. APM SMP penduduk perempuan tercatat sebesar 79,84 persen dan penduduk laki-laki sebesar 71,50 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk perempuan juga menunjukkan kondisi yang lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. APM penduduk perempuan sebesar 65,81 persen berbanding 61,33 persen (APM SMA penduduk laki-laki).

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

<http://lut.bps.go.id>



4

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Masalah di bidang ketenagakerjaan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi pemerintah. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2015 dan 2016 kondisi Agustus dan Februari. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2016 mencapai 524,5 ribu orang, bertambah sebanyak 10,9 ribu orang dibanding Agustus 2015. Jumlah penduduk yang bekerja di Maluku Utara pada Agustus 2016 mencapai 503,5 ribu orang, bertambah 20,9 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2015. Dari jumlah angkatan kerja tersebut TPAK bergerak naik di perkotaan sebesar 5,41 persen dari

61,34 persen di tahun 2015 menjadi 66,76 persen di tahun 2016. Sebaliknya di perdesaan terjadi penurunan TPAK sebesar 2,54 persen, dari 68,49 persen di tahun 2015 menjadi 65,95 persen pada tahun 2016. Secara keseluruhan TPAK di daerah perkotaan dan perdesaan menurun sebesar 0,24 persen, dari 66,43 persen menjadi 65,95 persen.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015-2016

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	61,34	66,76	7,17	4,54
Perdesaan	68,49	65,95	5,64	3,79
Perkotaan + Perdesaan	66,43	66,19	6,05	4,01

Sumber : Sakernas 2016

TPT bergerak turun baik di perkotaan maupun di perdesaan dimana penurunan TPT di perkotaan sebesar 2,63 persen dari 7,17 persen pada Agustus 2015 menjadi 4,54 persen pada Agustus 2016. Penurunan TPT di daerah perdesaan pada 2016 sebesar 1,85 persen dibandingkan 2015 dari 5,64 persen menjadi 3,79 persen. Secara keseluruhan TPT di perkotaan dan perdesaan turun sebesar 2,03 persen dari 6,05 persen di tahun 2015 menjadi 4,01 persen di tahun 2016. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, dimana tingkat TPT perkotaan sebesar 4,54 persen dan di perdesaan sebesar 3,79 persen. Jumlah penganggur pada Agustus 2016 mengalami penurunan yaitu sebanyak 10 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2015, dan berkurang sebanyak 7,8 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2015.

Pada tahun 2015 bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, penduduk yang menganggur lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan daripada di perdesaan. TPT di perkotaan terlihat lebih tinggi bila dibandingkan di perdesaan yaitu sebesar 7,17 persen berbanding 5,64 persen. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di sektor pertanian, dimana sektor ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian khusus. Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja

yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Untuk daerah perkotaan penurunan TPT terjadi pada penduduk dengan pendidikan SD ke bawah yang turun sebesar 1,08 persen dari 3,53 persen pada 2015 menjadi 2,45 persen pada 2016. Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan usaha untuk mereka yang tidak/belum bersekolah maupun tamatan SD semakin banyak. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan dimana angka TPT untuk mereka yang berpendidikan SD ke bawah turun 0,22 persen, dari 1,86 persen menjadi 1,63 persen.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2016

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	3,53	2,45	1,86	1,63	2,04	1,79
SMP	4,78	0,00	3,74	0,64	3,96	0,46
SMA Umum	9,92	7,36	11,72	4,88	11,00	5,75
SMA Kejuruan	4,80	5,07	16,97	4,69	11,32	4,85
Diploma I/II/III	6,16	13,26	9,28	3,86	8,25	7,17
Universitas	7,62	4,28	12,30	18,52	9,75	11,44
Total	7,17	4,54	5,64	3,79	6,05	4,01
SMA +	8,49	6,59	12,14	7,48	10,56	7,13

Sumber : Sakernas 2016

Hal yang menarik adalah di tahun 2016 TPT penduduk yang berpendidikan SMK lebih kecil dari TPT penduduk yang berpendidikan SMA baik di perkotaan maupun

perdesaan. TPT penduduk yang berpendidikan SMK di perkotaan sebesar 5,07 persen lebih kecil dari TPT penduduk yang berpendidikan SMA di perkotaan sebesar 7,36 persen. Untuk TPT penduduk yang berpendidikan SMK di perdesaan sebesar 4,69 persen lebih kecil dari TPT penduduk yang berpendidikan SMA di perdesaan sebesar 4,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK di perkotaan dan perdesaan sudah mulai terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan diploma cenderung menurun di tahun 2016, sebaliknya TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan universitas cenderung meningkat. TPT untuk penduduk yang berpendidikan universitas di perkotaan menurun sebesar 3,34 persen, dari 7,62 persen di tahun 2015 menjadi 4,28 persen di tahun 2016. Namun di perdesaan terjadi peningkatan sebesar 6,22 persen, dari 12,30 persen di tahun 2015 menjadi 18,52 persen di tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan universitas lebih banyak diterima lapangan usaha di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Sebaliknya penduduk dengan tingkat pendidikan diploma lebih banyak diterima lapangan usaha di daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan dimana TPT untuk penduduk yang berpendidikan diploma di perkotaan meningkat sebesar 7,09 persen, dari 6,16 persen di tahun 2015 menjadi 13,26 persen di tahun 2016. Namun di perdesaan terjadi penurunan sebesar 5,42 persen, dari 9,28 persen di tahun 2015 menjadi 3,86 persen di tahun 2016.

Secara umum di tahun 2016 TPT penduduk di daerah perdesaan menurun di semua tingkat jenjang pendidikan kecuali universitas, dimana penduduk dengan pendidikan universitas menjadi kelompok penganggur terbanyak. Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Selain itu penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan Sakernas 2016, secara umum persentase penduduk yang bekerja

pada sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 9,41 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 50,23 persen pada tahun 2015 menjadi 40,82 persen pada tahun 2016. Penurunan terbesar terjadi di daerah perdesaan yang mengalami penurunan sebesar 12,16 persen, dari 64,16 persen di tahun sebelumnya menjadi 52,00 persen di tahun 2016. Sebaliknya di perkotaan terjadi peningkatan sebesar 2,99 persen dari 11,33 persen di tahun 2015 menjadi 14,31 persen pada tahun 2016.

Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor industri dimana di sektor ini terjadi peningkatan sebesar 5,49 persen, meningkat dari 11,13 persen di tahun 2015 menjadi 16,62 persen di tahun 2016. Peningkatan di sektor industri terjadi karena adanya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor industri baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masing-masing sebesar 6,79 persen atau meningkat dari 14,03 persen di tahun 2015 menjadi 20,82 persen di tahun 2016 dan 4,75 persen atau meningkat 10,09 persen di tahun 2015 menjadi 14,85 persen di tahun 2016.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015-2016

Kelompok Usaha	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	11,33	14,31	64,16	52,00	50,23	40,82
Industri (M)	14,03	20,82	10,09	14,85	11,13	16,62
Jasa-Jasa (S)	74,64	64,86	25,75	33,16	38,64	42,56

Catatan : Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Cakupan lapangan usaha Industri(M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air; Bangunan.

Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan

Sumber : Susenas 2016

Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor jasa dimana penduduk yang bekerja di sektor ini secara umum meningkat 3,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya, naik dari 38,64 persen di tahun 2015 menjadi 42,56 persen di tahun 2016. Peningkatan terjadi di daerah perdesaan yang meningkat sebesar 7,41 persen, dari 25,75 persen di tahun 2015 menjadi 33,16 persen di tahun 2016. Sebaliknya di perkotaan terjadi penurunan sebesar 9,78 persen, dari 74,64 persen di tahun 2015 menjadi 64,86 persen di tahun 2016. Namun di perkotaan sektor jasa merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja (64,86 persen) dibandingkan di perdesaan yang hanya sebesar 33,16 persen dimana di daerah perdesaan sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (52,00 persen). Hal tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang beralih

dari sektor pertanian ke industri dan sektor jasa-jasa. Peningkatan penduduk yang bekerja di sektor jasa dapat diartikan bahwa sektor ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar di daerah perdesaan, sedangkan sektor jasa-jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja di daerah perkotaan. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang tersedia di perdesaan, sementara lahan di perkotaan yang relatif lebih sempit sehingga penduduk bekerja lebih banyak di luar sektor pertanian.

Pada tahun 2016 di daerah perdesaan sektor pertanian menyerap 52,00 persen, dimana terjadi penurunan sebesar 12,16 persen dibandingkan tahun 2015. Sedangkan sektor industri di daerah perdesaan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,85 persen, dimana terjadi peningkatan sebesar 4,75 persen dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 di daerah perdesaan terjadi pergeseran komposisi tenaga kerja dari sektor pertanian sebanyak 4,75 persen yang berpindah ke sektor industri dan 7,41 persen ke sektor jasa-jasa.

Sementara itu, sebanyak 64,86 persen penduduk yang bekerja di daerah perkotaan bekerja di sektor jasa-jasa dimana di sektor ini terjadi penurunan sebesar 9,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan pergeseran komposisi tenaga kerja yang berpindah ke sektor pertanian dan sektor industri yang masing-masing berpindah sebesar 2,99 dan 6,79 persen. Cakupan lapangan usaha pada sektor jasa-jasa adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan. Sektor jasa-jasa yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar di daerah perkotaan menunjukkan bahwa sektor ini memang menjadi andalan bagi penduduk perkotaan untuk mencari penghasilan.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/ karyawan adalah sebesar 32,01 persen atau mengalami peningkatan sebanyak 3,99 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri yang meningkat sebesar 1,28 persen, dari 20,04 persen di tahun 2015 menjadi 21,32 persen di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada pekerja yang berstatus berusaha dibantu pekerja tetap dan pekerja bebas baik di pertanian yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,58 persen dan 2,78 persen. Sedangkan jumlah pekerja yang berstatus berusaha dibantu pekerja tak dibayar menurun 1,00 persen, dari 20,35 persen di tahun 2015 menjadi 19,35 persen di tahun 2016. Penurunan juga terjadi pada pekerja yang berstatus pekerja bebas non pertanian dan pekerja tak dibayar.

Meningkatnya jumlah pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan terjadi di wilayah perdesaan yang bertambah sebesar 5,07 persen dibanding tahun sebelumnya, dari 20,51 persen di tahun 2015 menjadi 25,58 persen di tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada penduduk dengan status berusaha sendiri dan

pekerja bebas non pertanian yang meningkat sebesar 2,01 persen dan 2,99 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tetap, buruh/karyawan dan pekerja bebas pertanian di daerah perdesaan tahun 2016 pada tahun sebelumnya berasal dari penduduk yang berstatus sebagai berusaha sendiri berusaha dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas non pertanian dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2015-2016

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	24,08	23,02	18,59	20,60	20,04	21,32
Berusaha Dibantu Pekerja Tak dibayar	8,46	13,32	24,61	21,89	20,35	19,35
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap	2,86	3,06	3,56	4,34	3,38	3,96
Buruh/karyawan	49,01	47,27	20,51	25,58	28,02	32,01
Pekerja Bebas Pertanian	1,07	3,65	3,60	6,58	2,93	5,71
Pekerja Bebas Non Pertanian	5,50	0,00	2,52	0,00	3,30	0,00
Pekerja Keluarga	9,02	9,68	26,62	21,01	21,98	17,65

Sumber : Sakernas 2016

Sementara itu di perkotaan, pada tahun 2016 penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan masih menjadi yang terbesar dengan persentase sebesar 47,27 persen, atau menurun sebesar 1,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada penduduk yang berusaha sendiri yang turun 1,07 persen, dari 24,08 persen di tahun 2015 menjadi 23,02 persen di tahun 2016. Penduduk dengan status pekerja bebas non pertanian juga menurun sebesar 5,50 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya peningkatan terjadi pada penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap (4,86 persen), berusaha dibantu buruh tetap (0,20 persen), pekerja bebas pertanian (2,58 persen) dan pekerja tak dibayar (0,67 persen) di tahun 2016.

Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan

sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

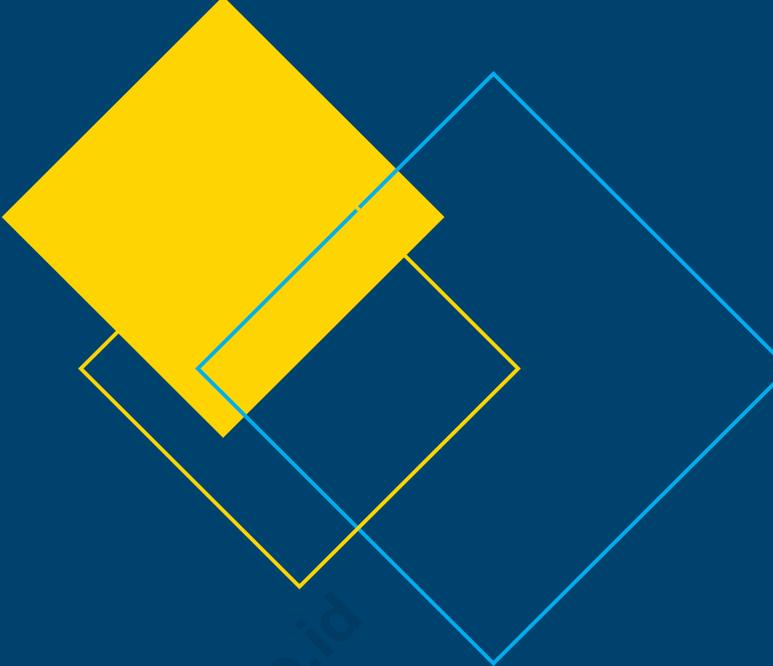
Secara umum persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu yang lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yakni dari 42,67 persen menjadi 31,92 persen. Di daerah perkotaan persentase pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal turun dari 25,80 persen pada tahun 2015 menjadi 23,40 persen pada tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan, dari 48,70 persen pada tahun 2015 menjadi 35,51 persen pada tahun 2016. Kondisi ini mengindikasikan pekerja yang dikategorikan setengah pengangguran di Maluku Utara dari tahun ke tahun semakin menurun.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2015-2016

Jumlah Jam Kerja Seminggu	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	1,77	4,53	1,80	2,34	1,79	2,99
1-7	0,91	1,14	2,14	1,63	1,82	1,49
8-14	2,41	2,91	6,83	6,79	5,66	5,64
15 - 24	8,25	6,15	17,97	9,51	15,41	8,52
25 - 34	12,47	8,68	19,96	15,23	17,98	13,29
35 +	74,20	76,60	51,30	64,49	57,33	68,08

Sumber : Sakernas 2016

Sementara itu, penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja dengan jam kerja 0 (nol) jam baik di perkotaan maupun di perdesaan naik dari 1,77 persen pada tahun 2015 menjadi 4,53 persen di tahun 2016 untuk daerah perkotaan dan dari 1,80 persen menjadi 2,34 persen di tahun 2016 untuk daerah perdesaan.



POLA KONSUMSI

<https://pub.ut.bps.go.id>



5

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Seperti hukum yang dikemukakan oleh Ernst Engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, hukum ini ditemukan Engel dari perangkat data survei pendapatan dan pengeluaran.

Pengeluaran Rumah Tangga

Secara umum data konsumsi/pengeluaran Susenas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

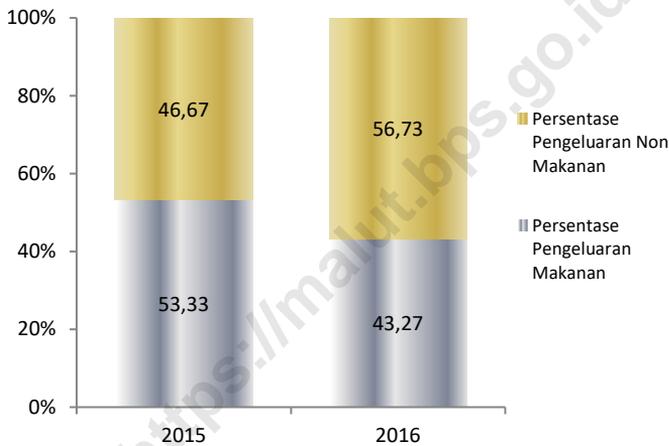
Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016

Daerah Tempat Tinggal	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	421.216	413.580	53,33	43,27
Bukan Makanan	368.679	542.188	46,67	56,73
Perumahan	232.736	331.918	29,46	34,73
Barang dan Jasa	86.025	131.240	10,89	13,73
Pakaian	23.604	33.258	2,99	3,48
Barang Tahan Lama	13.897	24.673	1,76	2,58
Lainnya	12.417	21.099	1,57	2,21
Jumlah	789.896	955.768	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2015 dan 2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2015-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 789.896,- menjadi Rp 955.768,-. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk makanan justru mengalami penurunan dari 53,33 persen pada tahun 2015 menjadi 43,27 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, pengeluaran non makanan meningkat dari 46,67 persen menjadi 56,73 persen. Peningkatan terbesar pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada pengeluaran untuk perumahan yang meningkat dari 29,46 persen pada tahun 2015 menjadi 34,73 persen pada tahun 2016.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2015 dan 2016



Gambar 5.1 menunjukkan adanya pergeseran pola pengeluaran selama 2015-2016. Pada 2015, penduduk di Maluku Utara lebih banyak menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan makanan dibanding kebutuhan non makanan, dengan perbandingan 53,33 persen untuk makanan dan 46,67 persen untuk kebutuhan non makanan. Sebaliknya pada 2016 penduduk Maluku Utara lebih sedikit mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non makanan, dengan perbandingan 43,27 persen untuk memenuhi kebutuhan makanan dan 56,73 persen untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Sementara itu, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,81 persen dibanding dengan tahun 2015, yaitu dari Rp 421.216,- menjadi Rp 413.580,- per kapita sebulan. Penurunan ini terjadi hampir di semua golongan pengeluaran kecuali golongan pengeluaran Rp 750.000 – Rp 999.999 dan > Rp. 1.000.000. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran makanan per kapita di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan untuk golongan pengeluaran per kapita > Rp 500.000.

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2015-2016

Golongan Pengeluaran per Kapita	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<149 999	-	-	-	-	-	-
150 000 - 199 999	-	-	140.353	134.422	140.353	134.422
200 000 - 299 999	168.424	178.454	180.270	175.292	179.974	175.552
300 000 - 499 999	275.204	247.002	289.634	241.607	286.954	242.256
500 000 - 749 999	393.975	328.275	351.028	363.748	360.310	357.536
750 000 - 999 999	422.291	427.839	472.981	482.581	459.799	464.817
> 1 000 000	614.421	609.635	670.003	685.881	643.011	645.084
Rata-rata per Kapita	465.188	466.434	404.776	394.030	421.216	413.580

Sumber : Susenas 2016

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk non makanan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari Rp 368.679,- pada 2015 menjadi Rp 542.188,- pada 2016 atau terjadi peningkatan sebesar 47,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran non makanan per kapita di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2015-2016

Golongan Pengeluaran per Kapita	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<149 999	-	-	-	-	-	-
150 000 - 199 999	-	-	50.596	61.489	50.596	61.489
200 000 - 299 999	115.507	93.988	92.937	75.357	93.502	83.770
300 000 - 499 999	141.866	168.114	98.485	157.319	106.542	180.300
500 000 - 749 999	232.382	278.956	271.603	262.820	263.127	322.041
750 000 - 999 999	443.381	438.982	397.248	375.248	409.245	589.128
> 1 000 000	880.134	994.196	716.223	701.798	795.821	1.845.971
Rata-rata per Kapita	510.105	619.048	315.800	313.212	368.679	542.188

Sumber : Susenas 2016

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Perkembangan Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Pada kriteria ini, penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan tersebut terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini (G). Nilai dari Indeks Gini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan.

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan yang ditetapkan Bank dunia, proporsi pengeluaran kelas penduduk 40 persen terendah selama dua tahun terakhir di atas 17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk Maluku Utara tergolong rendah. Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat pada kelas 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah selama periode 2015-2016 menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dari 23,72 persen pada 2015 menjadi 24,73 persen pada 2016. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah cenderung tidak menentu seiring

dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Sebaliknya pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi justru terjadi penurunan persentase yaitu dari 35,61 persen pada 2015 menjadi 35,52 persen pada 2016.

Tabel 5.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2015-2016

Proporsi Pengeluaran Penduduk	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
40 % Terendah	23,72	24,73
40 % Menengah	40,68	39,75
20 % Tertinggi	35,61	35,52
Indeks Gini	0,28	0,29

Sumber : Susenas 2016

Jika dilihat dari Indeks Gini, tampak bahwa distribusi pengeluaran penduduk mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 0,28 persen pada tahun 2015 menjadi 0,29 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa selama 2015-2016, tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran penduduk di Maluku Utara relatif rendah.

Taraf Konsumsi Kalori dan Protein

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

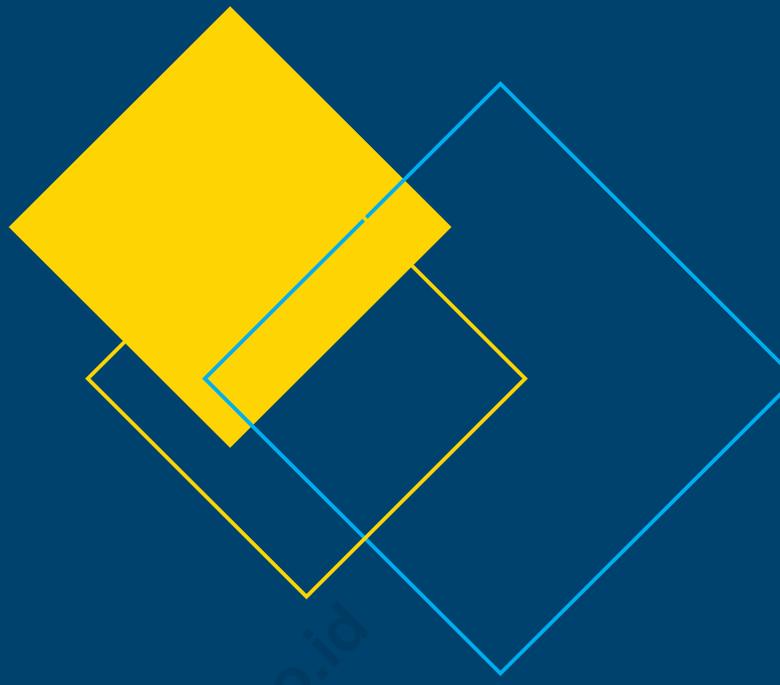
Pada tahun 2016 rata-rata konsumsi kalori penduduk Maluku Utara sebesar 1.720,41 kkal atau naik sebesar 32,07 kkal dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk Maluku Utara di tahun 2016 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Maluku Utara terus mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, yaitu dari 45,13 gram pada tahun 2015 menjadi 46,57 gram pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram.

Tabel 5.5 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal 2015-2016

Konsumsi per Kapita per Hari	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Energi (kkal)	1.715,18	1.703,72	1.678,30	1.726,59	1.688,34	1.720,41
Protein (gram)	51,48	49,14	42,76	45,62	45,13	46,57

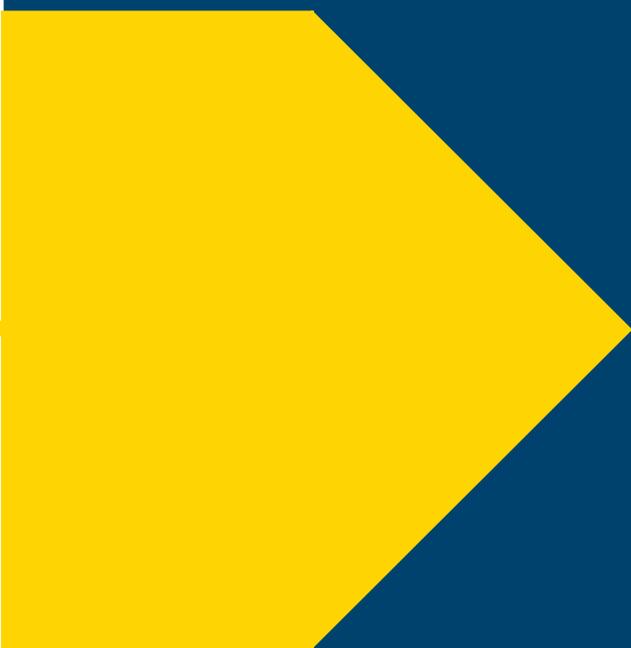
Sumber : Susenas 2016

Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk di perkotaan selama kurun waktu 2015-2016, yaitu 1.715,18 kkal pada tahun 2015 turun menjadi 1.703,72 kkal pada tahun 2016, sedangkan di daerah perdesaan pada tahun 2015 sebesar 1.678,30 kkal dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 1.726,59 kkal pada tahun 2016. Pada tahun 2016 rata-rata penduduk perkotaan mengkonsumsi protein sebanyak 49,15 gram sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya mengkonsumsi protein sebanyak 45,62 gram. Kecukupan konsumsi protein bagi penduduk perkotaan dan perdesaan masih berada di bawah standar kecukupan gizi. Hal ini menunjukkan bahwa baik penduduk perkotaan maupun perdesaan masih belum memperhatikan akan kebutuhan asupan energi dan protein yang dibutuhkan bagi anggota keluarganya dan kesehatan tubuh.



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<http://jalut.bps.go.id>



6

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki atap, lantai dan dinding. Di samping itu kualitas ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persentase rumah tangga menurut indikator kualitas perumahan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 6.1.

Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat jelas kualitas perumahan di Maluku Utara, dimana pada 2016 terdapat 91,08 persen rumah tangga yang berlantai bukan tanah, 93,96 persen beratap layak (rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes), dan 97,93 persen berdinding permanen (rumah dengan dinding terluas tembok dan kayu). Jika dilihat menurut tipe daerah, tampak perbedaan yang cukup signifikan untuk kualitas rumah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan. Perumahan yang

berada di wilayah perdesaan masih banyak yang berlantaikan tanah, yaitu sebesar 11,84 persen, sementara di perkotaan hanya 1,36 persen. Ditinjau dari atapnya, persentase rumah yang beratap layak di perdesaan relatif lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Pada 2016 sebanyak 99,13 persen rumah di daerah perkotaan telah beratap layak, sedangkan di daerah perdesaan baru mencapai 91,97 persen. Demikian pula kualitas rumah tinggal jika ditinjau dari jenis dinding terluas menunjukkan potret yang sama, yaitu rumah tangga dengan kualitas rumah berdinding permanen di daerah perkotaan sedikit lebih tinggi dibanding daerah perdesaan, yaitu 98,89 persen berbanding 97,55 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2015-2016

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai Bukan Tanah	98,92	98,64	87,84	88,16	90,88	91,08
Atap Layak	98,79	99,13	90,05	91,97	92,45	93,96
Dinding Permanen	98,15	98,89	96,46	97,55	96,92	97,93

Sumber : Susenas 2016

Lebih rinci pengamatan per kabupaten/kota di Maluku Utara sepanjang tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang berlantai tanah di beberapa kabupaten/kota masih cukup tinggi bahkan ada yang diatas 20 persen yaitu Kabupaten Pulau Morotai (20,39 persen). Sebaliknya persentase rumah tangga yang berlantai tanah di Kabupaten Pulau Taliabu dan Ternate relatif kecil tidak sampai 1 persen. Bila ditinjau dari atapnya maka persentase rumah tangga yang beratap layak di Kabupaten Pulau Taliabu paling rendah yaitu sebesar 72,57 persen, sebaliknya di Ternate 100 persen rumah tangga telah memiliki atap yang layak. Bila dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki dinding permanen maka Kabupaten Halmahera Barat merupakan wilayah dengan persentase terkecil di Maluku Utara yaitu sebesar 93,94 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya, diantaranya tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus-menerus diusahakan pemerintah.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2015-2016

Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	73,06	77,58	15,76	15,41	31,49	32,72
Air Minum bersih 1)	66,29	86,90	44,52	50,68	47,73	60,76
Jamban sendiri	78,26	77,40	51,98	51,55	59,20	58,75
Jamban sendiri dengan tangki septik	89,47	70,40	55,75	40,40	65,01	51,40
Sumber penerangan listrik	99,84	99,70	84,01	86,25	88,36	89,99

Sumber : Susenas 2016

Pada 2016, rumah tangga di Maluku Utara yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum baru mencapai 32,72 persen. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan bila dibandingkan menurut tipe daerah. Pada 2016 di daerah perkotaan tercatat 77,58 persen rumah tangga yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air yang berasal dari ledeng, sementara di perdesaan hanya 15,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup penduduk perkotaan dalam hal mengkonsumsi air sangat jauh berbeda dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di perdesaan. Sementara rumah tangga pengguna air minum bersih di Maluku Utara sebesar 60,76 persen. Mayoritas rumah tangga di perkotaan sudah mengkonsumsi air minum bersih (86,90 persen), sedangkan rumah tangga di perdesaan yang mengkonsumsi air minum bersih baru sebesar 50,68 persen.

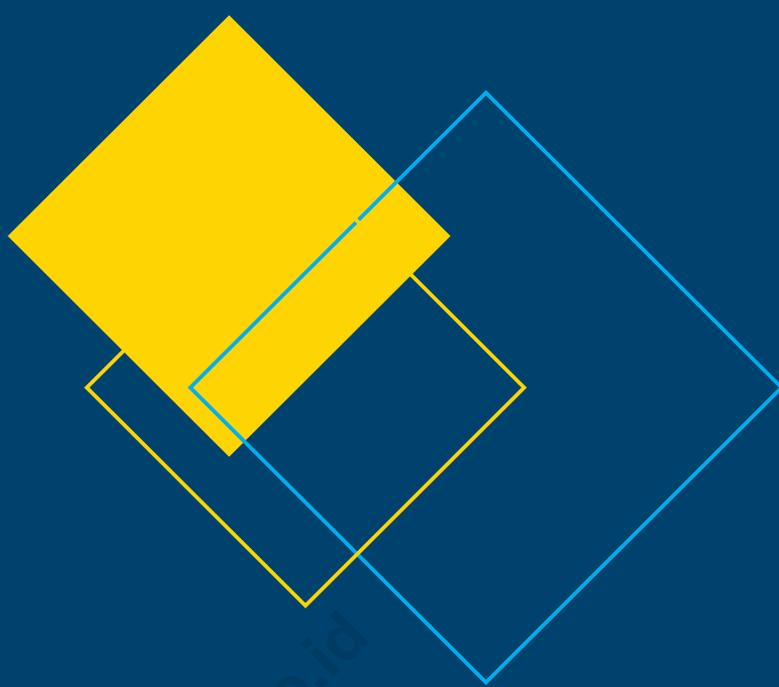
Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa di Maluku Utara rumah tangga mempunyai fasilitas jamban sendiri pada 2016 mencapai 58,75 persen. Sama halnya dengan indikator-indikator perumahan lainnya, profil perumahan di Maluku Utara dilihat dari kepemilikan jamban sendiri oleh rumah tangga jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding rumah tangga yang tinggal di perdesaan yaitu 77,40 berbanding 51,55 persen.

Di samping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga

dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada 2016 rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 51,40 persen. Bila dilihat berdasarkan tipe daerah, maka di perkotaan memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 70,40 persen dibanding di daerah perdesaan yang baru mencapai 40,40 persen.

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik yang dihasilkan lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Tabel 6.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016, 89,99 persen rumah tangga di Maluku Utara telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Penggunaan listrik oleh rumah tangga di daerah perkotaan sebesar 99,70 persen, di daerah perdesaan tercatat 86,25 persen. Rendahnya penggunaan listrik di daerah perdesaan dirasa wajar karena sampai saat ini masih banyak wilayah perdesaan di Maluku Utara yang belum dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sedangkan untuk penggunaan listrik non PLN juga relatif sedikit karena harga dari bahan bakar listrik non PLN cukup mahal.



<https://malut.bps.go.id>

KEMISKINAN



7

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan.

Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah masalah nasional yang harus segera ditanggulangi. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Potret kemiskinan di Maluku Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Perkembangan Kemiskinan, 2014-2016

Indikator Kemiskinan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	84,79	79,90	74,68
Penduduk Miskin (Persen)	7,41	6,84	6,33
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,16	0,70	0,73
Indeks Keparahan (P2)	0,24	0,13	0,18
Garis Kemiskinan (000 Rp)	316,16	344,09	376,55

Sumber : Susenas 2016

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, diantaranya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2).

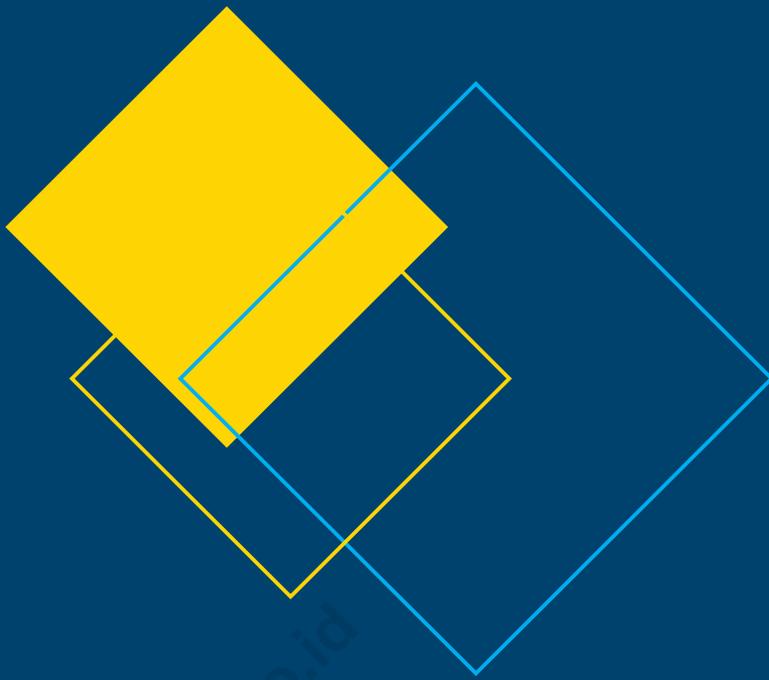
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara umum, garis kemiskinan di Maluku Utara pada 2016 mengalami kenaikan dibandingkan 2015 yaitu sebesar 9,44 persen atau naik dari Rp. 344,09 ribu pada 2015 menjadi Rp. 376,55 ribu pada 2016.

Pada 2014-2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 5,77 persen,

yaitu dari 84,79 ribu jiwa menjadi 79,90 ribu jiwa. Bila dilihat persentase dari penduduk miskin selama 2013-2014, maka jumlahnya menurun dari 7,41 persen menjadi 6,84 persen. Sedangkan pada 2015-2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 6,53 persen dari 79,90 ribu jiwa menjadi 74,68 ribu jiwa di tahun 2016.

Persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode 2014–2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) terus menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,16 pada 2014 menjadi 0,70 pada 2015, dan naik kembali menjadi 0,73 pada 2016. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), dimana pada 2014 tercatat sebesar 0,24 turun menjadi 0,13 persen pada 2015 dan naik kembali menjadi 0,18 pada 2016. Kenaikan nilai kedua indeks tersebut di tahun 2016 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi; garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.



SOSIAL LAINNYA

8

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk yang melakukan perjalanan, persentase penduduk yang menguasai media teknologi komunikasi dan informasi seperti telepon, telepon seluler dan komputer, persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, serta persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan.

Perjalanan

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan jarak perjalanan pergi dan pulang (PP) sejauh minimal 100 km dan tidak dalam rangka mencari nafkah serta tidak dilakukan secara rutin. Berdasarkan konsep ini, Tabel 8.1 menyajikan persentase penduduk yang melakukan perjalanan pada 2016 dan tujuan utama melakukan perjalanan.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Tujuan Utama dan Tipe Daerah, 2015-2016

Tujuan Utama Perjalanan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berlibur/rekreasi	28,80	31,52	19,66	17,69	22,62	23,53
Profesi/Bisnis/Misi/ Pertemuan/Kongres/ Seminar/Pendidikan/ Pelatihan	17,29	20,56	19,32	17,63	18,66	18,87
Kesehatan/berobat/ Olahraga/Kesenian	4,36	6,54	6,39	6,67	5,73	6,61
Mengunjungi teman/ keluarga,	46,74	37,96	42,09	47,42	43,59	43,43
Berziarah/keagamaan/ Lainnya	2,81	3,42	12,54	10,59	9,39	7,57

Sumber : Susenas 2016

Pada 2016, penduduk yang melakukan perjalanan sebanyak 7,26 persen.

Apabila dilihat menurut tipe daerah, penduduk di perkotaan lebih banyak yang melakukan perjalanan dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan (11,36 persen berbanding 5,75 persen).

Lebih dari sepertiga penduduk yang melakukan perjalanan (43,43 persen) dengan alasan mengunjungi teman/keluarga. Tujuan lain yang menjadi alasan penduduk untuk melakukan perjalanan adalah berlibur/rekreasi (23,53 persen), profesi/bisnis/ seminar/pendidikan/pelatihan (18,87 persen), berziarah/keagamaan/lainnya (7,57 persen) dan kesehatan/berobat/olahraga (6,61 persen). Pola yang hampir sama ditunjukkan oleh penduduk di perkotaan dan perdesaan.

Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana komunikasi tidak kalah pesat perkembangannya. Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan telepon biasa, meskipun harga telepon seluler maupun pulsanya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati karena lebih praktis dibawa ke mana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi di manapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan jaringan yang semakin meluas.

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2015-2016

Alat Komunikasi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Telepon	3,46	2,62	0,16	0,25	1,07	0,91
Telepon Seluler	66,13	96,90	37,13	78,9	45,08	83,90
Komputer	37,12	38,10	9,61	9,24	17,16	17,27

Sumber : Susenas 2016

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sekarang ini sangat terlihat jelas pada peningkatan kepemilikan alat komunikasi seperti telepon, telepon seluler, dan komputer. Jika dilihat menurut tipe daerah, daerah perkotaan selalu mempunyai persentase lebih besar daripada perdesaan (Tabel 8.2). Perkembangan telepon seluler yang cukup pesat berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa/telepon rumah. Hal ini dapat dilihat berkurangnya rumah tangga yang mempunyai telpon rumah di daerah perkotaan. Masyarakat yang cenderung memilih telepon seluler karena praktis dapat dibawa kemana-mana, lebih bersifat pribadi, tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik,

menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Persentase rumah tangga yang memilih telepon seluler sebanyak 83,90 persen pada tahun 2016.

Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya yaitu akses internet. Media internet ini digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada 2016, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet sebesar 14,04 persen, dimana penduduk perkotaan yang memiliki akses internet jauh lebih besar dari penduduk perdesaan yaitu 36,37 persen berbanding 5,78 persen.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Akses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Lokasi/Media, 2015-2016

Lokasi/Media untuk Akses Internet	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sendiri	71,83	86,5	70,84	77,89	71,49	83,91
Bukan Rumah Sendiri	25,96	27,67	24,17	28,45	25,34	27,91
Tempat Bekerja/Kantor	33,41	37,45	24,60	26,71	30,36	34,22
Sekolah/Kampus	22,24	28,89	23,31	23,01	22,61	27,12
Tempat Umum	54,19	48,43	40,81	48,11	49,56	48,33
Di Dalam Kendaraan Bergerak	6,56	5,23	4,72	8,01	5,92	6,06
Penduduk yang Akses Internet (%)	26,60	36,37	5,32	5,78	11,16	14,04

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan Tabel 8.3 dapat dilihat bahwa dari penduduk yang pernah akses internet, mayoritas penduduk mengakses internet di rumah sendiri (83,91 persen) dan di tempat umum seperti warnet (48,33 persen). Sementara masih sangat sedikit penduduk yang mengakses internet di dalam kendaraan bergerak yaitu 6,06 persen.

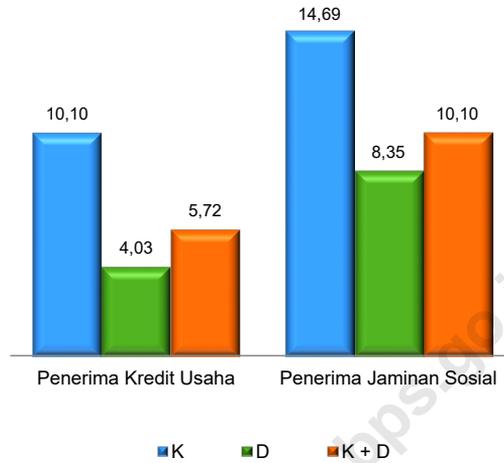
Pemberian Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Sosial

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 8.1 memperlihatkan bahwa pada 2016, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha selama setahun terakhir adalah 5,72 persen. Jika dilihat

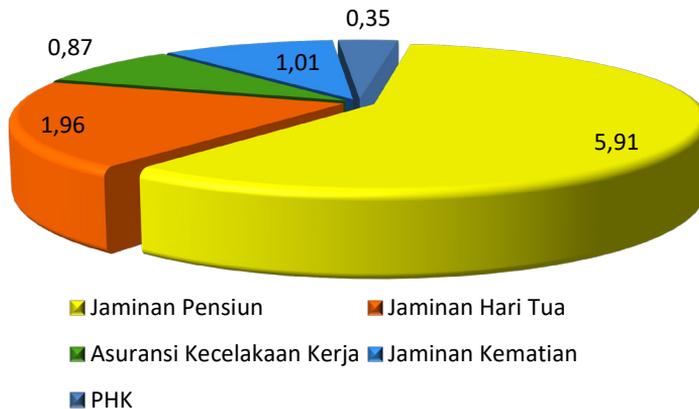
menurut tipe daerah, rumah tangga di perkotaan yang menerima kredit usaha pada 2016 sebanyak 10,10 persen, sedangkan di daerah pedesaan sebesar 4,03 persen.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2016



Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa secara umum terdapat 10,10 persen rumah tangga yang pernah menerima jaminan sosial selama 6 bulan terakhir. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, jaminan sosial lebih banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Persentase rumah tangga di perkotaan dan pedesaan yang menerima jaminan sosial yaitu 14,69 persen berbanding 8,35 persen.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial, 2016



Rumah tangga yang menerima jaminan sosial pada 2016, paling banyak menggunakan jaminan pensiun/veteran (5,91 persen). Hal ini disebabkan kategori ini mencakup pelayanan kesehatan gratis yang didapat dari fasilitas BPJS Kesehatan bagi pegawai negeri sipil/pensiunan. Sementara itu pemanfaatan jaminan hari tua menunjukkan persentase sebesar 1,96 persen. Rumah tangga yang memanfaatkan jaminan/asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), masing-masing sebanyak 1,01 persen, 0,87 persen dan 0,35 persen.

Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2016 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.

Tabel 8.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2015-2016

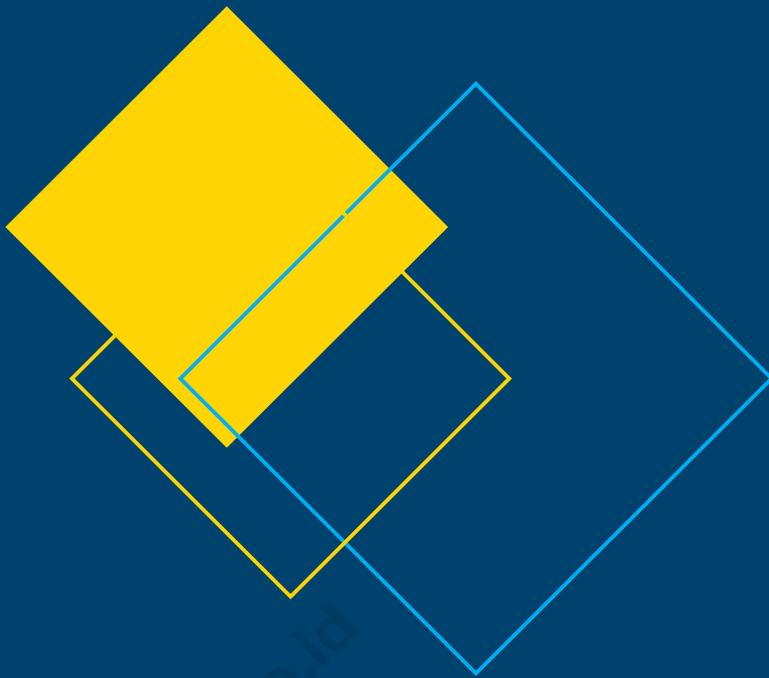
Tahun	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	1,81	0,75	1,06
2016	1,57	0,76	0,98

Sumber : Susenas 2016

Selama tahun 2016 penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan sebesar 0,08 persen menjadi 0,98 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai dari 1,06 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan yang terjadi di perkotaan sebesar 0,24 persen menjadi 1,57 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai dari 1,81 persen. Sebaliknya penduduk perdesaan yang menjadi korban kejahatan mengalami peningkatan yang relatif tidak berarti sebesar 0,01 persen menjadi 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,75 persen. Selama tahun 2016 tingkat keamanan di wilayah perdesaan relatif lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan, dimana korban tindak kejahatan lebih banyak ditemui di daerah perkotaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>



<https://malut.bps.go.id>

LAMPIRAN



L

LAMPIRAN 1

Kabupaten/Kota	Penduduk Maluku Utara 2016		
	Lk	Pr	Lk + Pr
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	57.593	55.129	112.722
Halmahera Tengah	26.283	25.032	51.315
Kepulauan Sula	49.203	47.974	97.177
Halmahera Selatan	113.655	109.805	223.460
Halmahera Utara	93.806	89.790	183.596
Halmahera Timur	45.973	41.707	87.680
Pulau Morotai	32.123	30.289	62.412
Pulau Taliabu	26.196	25.120	51.316
Ternate	110.725	107.303	218.028
Tidore Kepulauan	49.511	48.695	98.206
Maluku Utara	605.068	580.844	1.185.912

LAMPIRAN 2

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Tahun 2015-2016 (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	112.722	1,79	104,47
Halmahera Tengah	51.315	2,98	105,00
Kepulauan Sula	97.177	1,97	102,56
Halmahera Selatan	223.460	1,64	103,51
Halmahera Utara	183.596	1,92	104,47
Halmahera Timur	87.680	2,88	110,23
Pulau Morotai	62.412	2,74	106,06
Pulau Taliabu	51.316	1,19	104,28
Ternate	218.028	2,33	103,19
Tidore Kepulauan	98.206	1,26	101,68
Maluku Utara	1.185.912	2,01	104,17

LAMPIRAN 3

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km 2	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	1.704,20	112.722	66,14	9,51
Halmahera Tengah	2.653,76	51.315	19,34	4,33
Kepulauan Sula	3.304,32	97.177	29,41	8,19
Halmahera Selatan	8.148,90	223.460	27,42	18,84
Halmahera Utara	3.896,90	183.596	47,11	15,48
Halmahera Timur	6.571,37	87.680	13,34	7,39
Pulau Morotai	2.476,00	62.412	25,21	5,26
Pulau Taliabu	1.469,93	51.316	34,91	4,33
Ternate	111,39	218.028	1.957,34	18,38
Tidore Kepulauan	1.645,73	98.206	59,67	8,28
Maluku Utara	31.982,50	1.185.912	37,08	100,00

LAMPIRAN 4

Kabupaten/Kota	Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016			
	10-15	16-18	19-24	25 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	3,80	29,48	52,26	14,45
Halmahera Tengah	9,21	29,97	45,02	15,80
Kepulauan Sula	5,10	23,45	51,41	20,04
Halmahera Selatan	7,92	31,05	49,45	11,58
Halmahera Utara	3,82	32,92	49,16	14,09
Halmahera Timur	6,13	26,10	52,54	15,22
Pulau Morotai	5,04	24,34	55,43	15,18
Pulau Taliabu	6,76	37,24	49,47	6,54
Ternate	2,17	19,75	57,31	20,77
Tidore Kepulauan	2,02	20,23	53,45	24,30
Maluku Utara	4,83	27,08	51,95	16,13

LAMPIRAN 5

Kabupaten/Kota	Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2016				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	89,24	87,81	96,66	74,63	82,33
Halmahera Tengah	83,75	83,01	88,00	69,29	81,65
Kepulauan Sula	74,06	62,91	76,06	65,54	63,15
Halmahera Selatan	90,31	87,01	91,48	71,91	82,59
Halmahera Utara	91,48	78,23	91,48	73,97	66,18
Halmahera Timur	87,83	84,15	88,84	70,80	79,90
Pulau Morotai	75,75	70,90	77,80	60,05	67,89
Pulau Taliabu	79,57	52,39	79,98	43,12	48,55
Ternate	92,81	83,57	91,12	71,60	84,82
Tidore Kepulauan	94,88	89,64	93,56	82,39	86,30
Maluku Utara	88,07	80,36	89,09	70,69	76,24

LAMPIRAN 6

Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2016								
Kabupaten/ Kota	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	22,48	2,25	56,94	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00
Halmahera Tengah	7,74	0,92	67,10	0,00	0,00	21,55	0,00	2,69
Kepulauan Sula	11,95	0,00	18,37	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00
Halmahera Selatan	6,95	0,00	56,33	1,62	0,00	35,10	0,00	0,00
Halmahera Utara	12,32	0,91	71,86	2,14	3,35	8,09	1,36	0,00
Halmahera Timur	14,69	2,15	43,00	3,50	0,00	27,10	3,88	5,68
Pulau Morotai	7,41	0,00	51,35	0,00	0,00	38,55	2,68	0,00
Pulau Taliabu	0,00	0,00	27,25	4,83	0,00	67,92	0,00	0,00
Ternate	40,46	4,87	49,96	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00
Tidore Kepulauan	38,19	0,76	30,76	0,00	1,51	28,78	0,00	0,00
Maluku Utara	19,18	1,57	50,30	1,10	0,65	26,14	0,56	0,50

LAMPIRAN 7

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Sebulan Terakhir menurut kab/kota Dan Tempat/Cara Berobat, 2016					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter/ Klinik	Puskesmas	UKBM*	Bantra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	89,24	87,81	96,66	74,63	82,33	82,33
Halmahera Tengah	83,75	83,01	88,00	69,29	81,65	81,65
Kepulauan Sula	74,06	62,91	76,06	65,54	63,15	63,15
Halmahera Selatan	90,31	87,01	91,48	71,91	82,59	82,59
Halmahera Utara	91,48	78,23	91,48	73,97	66,18	66,18
Halmahera Timur	87,83	84,15	88,84	70,80	79,90	79,90
Pulau Morotai	75,75	70,90	77,80	60,05	67,89	67,89
Pulau Taliabu	79,57	52,39	79,98	43,12	48,55	48,55
Ternate	92,81	83,57	91,12	71,60	84,82	84,82
Tidore Kepulauan	94,88	89,64	93,56	82,39	86,30	86,30
Maluku Utara	88,07	80,36	89,09	70,69	76,24	76,24

LAMPIRAN 8

Kabupaten/ Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki															
	Tidak Memiliki Ijazah		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		Diploma I dan Diploma II		Akademi/ Diploma III		Diploma IV/ S1/S2/S3	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Halmahera Barat	21,74	27,06	0,00	0,00	37,62	37,72	0,00	0,32	10,71	16,91	0,81	0,02	0,16	0,00	28,98	17,96
Halmahera Tengah	24,07	31,81	0,00	0,00	31,56	33,28	0,00	0,00	9,23	14,99	1,47	1,43	1,08	0,34	32,58	18,16
Kepulauan Sula	18,29	21,13	0,00	0,00	40,68	40,35	0,00	0,12	8,98	14,26	2,07	1,85	0,31	0,08	29,67	22,20
Halmahera Selatan	28,79	33,83	0,00	0,19	33,62	32,65	0,00	0,00	10,46	14,40	0,00	1,00	0,00	0,00	27,14	17,94
Halmahera Utara	21,82	23,10	0,26	0,17	31,95	34,85	0,00	0,00	14,19	13,62	0,20	0,88	0,14	0,20	31,44	27,18
Halmahera Timur	31,13	30,38	0,17	0,00	33,85	36,59	0,00	0,00	6,96	15,64	1,40	0,35	0,10	0,00	26,39	17,03
Pulau Morotai	26,50	34,28	0,00	0,00	33,47	31,01	0,23	0,00	9,80	16,68	1,95	2,09	0,50	0,00	27,56	15,94
Pulau Taliabu	18,26	25,16	0,00	0,00	45,84	40,93	0,00	0,00	6,96	17,38	1,30	0,87	0,42	0,00	27,22	15,66
Ternate	22,28	22,12	0,07	0,00	20,93	22,85	0,00	0,00	9,24	12,28	1,85	0,49	0,45	0,26	45,18	42,00
Tidore Kepulauan	26,92	28,53	0,38	0,00	31,84	31,20	0,20	0,21	8,86	11,92	1,97	1,09	0,20	0,82	29,63	26,23
Maluku Utara	24,18	27,07	0,10	0,06	32,11	32,63	0,03	0,06	10,06	14,23	1,13	0,89	0,26	0,17	32,14	24,89

LAMPIRAN 9

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	99,06	98,68	98,42
Halmahera Tengah	97,81	98,53	98,58
Kepulauan Sula	98,07	98,74	97,96
Halmahera Selatan	96,64	98,05	98,65
Halmahera Utara	97,80	98,08	99,23
Halmahera Timur	98,35	98,03	96,60
Pulau Morotai	99,45	97,39	97,29
Pulau Taliabu	-	97,87	97,59
Ternate	99,82	99,64	99,72
Tidore Kepulauan	98,78	98,25	99,47
Maluku Utara	98,36	98,49	98,67

LAMPIRAN 10

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	70,50	71,92		4,00	4,29	
Halmahera Tengah	69,17	68,13		4,90	10,36	
Kepulauan Sula	59,63	72,15		9,67	3,75	
Halmahera Selatan	66,47	69,35		2,34	6,31	
Halmahera Utara	60,12	63,62		4,17	5,81	
Halmahera Timur	66,86	72,06		4,35	4,03	
Pulau Morotai	56,92	56,39		3,70	9,97	
Pulau Taliabu	-	66,93		-	9,72	
Ternate	62,14	61,17		8,72	6,87	
Tidore Kepulauan	66,75	66,23		3,69	4,58	
Maluku Utara	63,88	66,43	66,19	5,29	6,05	4,01

* Sampel Sakernas tahun 2016 hanya digunakan untuk estimasi tingkat Provinsi

LAMPIRAN 11

Kabupaten/Kota	<i>Gini Ratio</i>		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,25	0,23	0,26
Halmahera Tengah	0,34	0,32	0,27
Kepulauan Sula	0,29	0,30	0,26
Halmahera Selatan	0,30	0,24	0,21
Halmahera Utara	0,31	0,29	0,26
Halmahera Timur	0,27	0,26	0,27
Pulau Morotai	0,29	0,27	0,24
Pulau Taliabu	-	0,23	0,27
Ternate	0,29	0,24	0,27
Tidore Kepulauan	0,22	0,20	0,23
Maluku Utara	0,32	0,28	0,29

LAMPIRAN 12

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016		
	Lantai Bukan Tanah	Atap Layak	Dinding Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	87,10	91,55	93,34
Halmahera Tengah	90,51	97,87	99,47
Kepulauan Sula	91,36	91,35	99,38
Halmahera Selatan	88,79	92,49	98,96
Halmahera Utara	84,96	97,31	98,81
Halmahera Timur	89,72	95,19	98,65
Pulau Morotai	79,61	87,20	95,96
Pulau Taliabu	99,92	72,57	94,33
Ternate	99,12	100,00	99,25
Tidore Kepulauan	96,25	95,41	97,05
Maluku Utara	91,08	93,96	97,93

DARTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2017). *Maluku Utara dalam Angka 2017*. Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2016*. Ternate.

<https://malut.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari leding, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) ≥ 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 5 tahun dan 66 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak usia sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, minimal selama satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap

sebagai pekerja. bekerja dianggap sebagai pekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per km².

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengangguran

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi minuman, tembakau dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya dan kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja tidak dibayar

Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga rumah tangga atau bahkan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Perjalanan

Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin.

Rata-rata lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapat tanda tamat ijazah.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak atau belum pernah bersekolah disekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan sekolah.

Tidak Bersekolah Lagi

Yaitu pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

SUMBER DATA

SENSUS PENDUDUK

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan enam kali sensus penduduk yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang ada di wilayah geografis Indonesia (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tunawisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar lima persen rumah tangga.

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dilaksanakan setiap tahun dengan pergantian modul setiap tiga tahunan. Data pokok yang dicakup antara lain: data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

1. Konsumsi/Pengeluaran
2. Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
3. Sosial Budaya dan Pendidikan.

SUMBER DATA LAINNYA

Selain dari sensus dan survei, Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Maluku Utara 2016 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi pemerintah di luar BPS yang terangkum dalam Maluku Utara dalam Angka sebagai sumber data sekunder.

<https://malut.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65 Ternate, Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301
Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email : bps8200@bps.go.id

